

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BPKAD KABUPATEN BIAK NUMFOR

Stevanus

NPP. 31.1064

Asdaf Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

Program Studi Keuangan Publik

Email : 31.1064@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Haromin S.sos M.si

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS IN IMPROVING FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY AT BPKAD BIAK NUMFOR REGENCY

Problem Statement/Background (GAP): Information systems have been a significant impact in realizing e-government, especially in local financial management. Information technology helps local governments in compiling data and information related to financial reporting such as automatic recording helps in recording financial transactions in real time, online payments pay taxes and other fees online reduces administrative complexity, increased transparency in public access increases public trust in government and financial reports that can be published online and easily accessed by the public, in conducting this research the researcher uses information system theory according to laudon and laudon 2005: (99-144) which has four dimensions, namely, organization, management, technology, and expertise that help the research being carried out. **Purpose:** This study is to determine how the application, inhibitor factors, and efforts made by the Biak Numfor Regency Government to SIPD in financial management at BPKAD Biak Numfor Regency which is readjusted to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 70 of 2019 concerning Local Government Information Systems. **Method:** This research uses descriptive qualitative research methods using inductive data in taking general truths from phenomena or events. Researchers describe phenomena or events in detail where data is collected through observation, interviews, or document analysis which is in turn analysed to find patterns, themes, and relationships that emerge from the data. **Result:** The results of the research show that the Biak Numfor Regency has implemented the directives and instructions from the Ministry of Home Affairs related to the Implementation of the Local Government Information System well, **Conclusion:** although there are several obstacles and problems but have been faced properly with various efforts that are made so that the implementation of SIPD can continue to run with the directions that have been given.

Key words: Local Government Information System. Financial management, Accountability

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BPKAD KABUPATEN BIAK NUMFOR

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan *e-government*, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Teknologi informasi membantu pemerintah daerah dalam menyusun data dan informasi terkait pelaporan keuangan seperti pencatatan otomatis membantu dalam mencatat transaksi keuangan secara *reltime*, pembayaran *online* membayar pajak dan biaya lainnya secara online mengurangi kerumitan administrasi, peningkatan transparansi dalam akses publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta laporan keuangan yang dapat dipublikasikan secara online dan mudah diakses oleh masyarakat, dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teori sistem informasi menurut Laudon dan Laudon 2005 : (99-144) yang memiliki empat dimensi yaitu, organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian yang membantu penelitian yang dilaksanakan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kepada SIPD dalam pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang mana disesuaikan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data induktif dalam mengambil kebenaran umum dari fenomena atau suatu kejadian. Peneliti mendeskripsikan fenomena atau kejadian secara merinci yang dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data tersebut. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan arahan dan perintah dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan baik, **Kesimpulan:** meskipun terdapat beberapa hambatan dan kendala tetapi telah dihadapi dengan benar dengan berbagai upaya yang dilakukan agar penerapan SIPD dapat tetap berjalan dengan arahan yang telah diberikan.

Kata kunci : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan, Akuntabilitas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan sistem informasi setiap harinya mengalami perkembangan dan percepatan dalam memberikan informasi yang akurat serta dapat diterima oleh setiap orang dengan cepat dan tepat, presiden Republik Indonesia menertibkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan ini dalam penerapan sistem pemerintahan di Indonesia yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel serta dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik yang dapat berdampak juga pada pengelolaan keuangan yang baik yang diterapkan di pusat sampai daerah. Menurut Ndraha (2003:7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan kelompok atau organisasi yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berdampingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan asas otonomi dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat memberikan hak khusus kepada beberapa daerah yaitu hak otonomi untuk mengurus sendiri setiap urusan pemerintah daerah seperti pemilihan pemimpin daerah, aparatur daerah, mengelola keuangan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia lainnya yang berada di daerah didapatkan juga.

Menurut Halim (2001) yang menyatakan: “pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan organisasi. Dalam mewujudkan suatu peningkatan dalam sistem informasi pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, merupakan kebijakan yang memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan transparansi antara pemerintah dengan masyarakat, peraturan ini memberikan landasan hukum dan pedoman teknis mengenai sistem informasi pemerintahan daerah seperti publikasi informasi keuangan dan program – program pemerintah secara terbuka, data keuangan dan informasi pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat melalui portal *online*. Dalam pelaksanaannya SIPD memiliki beberapa kendala yang harus di evaluasi kembali oleh pemerintah kabupaten Biak Numfor khususnya kantor BPKAD Biak Numfor , bersumber dari hasil tanya jawab singkat yang dilakukan oleh penulis dan sekretaris BPKAD Kabupaten Biak Numfor melewati telfon yang disambungkan kepada salah satu operator SIPD ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan SIPD di kabupaten Biak Numfor, adapun permasalahan yang dihadapi adalah jumlah tenaga ahli yang belum mampu mengoperasikan SIPD dalam satu instansi contohnya seperti pada salah instansi pemerintah kelurahan mandala yang dimana hanya memiliki dua operator, akses internet dan jaringan yang terdapat di kabupaten Biak Numfor menjadi kendala dalam pengoperasian SIPD terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jangkauan internet yang memadai dalam pengoperasian SIPD dimana kecepatan rata rata 7 Mbps, dalam penggunaan *hardware* dan *software* dalam mendukung pengoperasian SIPD juga masih sangat kurang di setiap instansi dikarenakan kurangnya fasilitas komputer yang ada.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerapan SIPD memang sangat mempermudah setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia dalam pengelolaan tata pemerintahan daerah selain dapat termonitor oleh pemerintah pusat dalam pembangunan pemerintahan daerah pun menjadi rata dan tidak tertinggal tetapi hal ini menjadi suatu hal evaluasi bagi pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang dimana harus menyesuaikan lagi penginputan data pelaporan data yang ada di SIPD dan SIMDA. Dikarenakan data informasi pemerintahan daerah yang sudah ada terlebih dahulu berada di SIMDA yang harus disesuaikan kembali atau integrasikan kembali di SIPD, berpengaruh pada penginputan data pelaporan keuangan.

Penginputan ulang ini secara tidak langsung membuat pekerjaan yang dilakukan terbilang dua kali kerja karena dampak dari penginputan data ini langsung kepada pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan pelaporan keuangan dengan menggunakan SIPD mempermudah kinerja tetapi hal ini menjadi kelemahan pada pemerintah daerah dikarenakan penginputan data yang harus sesuai dan terintegrasi, bersama dengan SIMDA sebagai

pendamping bagi SIPD membuat pemerintah daerah mesti melakukan upaya dalam menangani kendala yang dihadapi agar pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada dapat penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada yaitu :Penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah yang baru digunakan oleh BPKAD Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 dimana belum sepenuhnya sampai pada tahap penatausahaan dan masi menggunakan SIMDA dalam penatausahaan, Sumber daya manusia yang masi sangat kurang yaitu dalam pengoperasian dan penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah serta sarana prasaran dalam mendukung berjalannya SIPD, dalam hal ini adalah *hardware* dan *software*, Kualitas akses internet yang belum baik membuat penatausahaan keuangan yang akan dilakukan menjadi terhambat dari penerimaan, penyetoran, laporan pertanggungjawaban penerimaan, pengelolaan uang persediaan, dan lainnya menjadi tidak tepat waktu dan menghambat pengelolaan keuangan.

Dapat dilihat dari identifikasi masalah diatas penulis akan melakukan penelitian terhadap penerapan SIPD di BPKAD kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Biak Numfor dimana berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan dalam sistem.

1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penerapan SIPD ataupun sistem informasi yang digunakan dalam mengelolaa keuangan daerah. Penelitian pertama ditulis oleh Nusation, I. M., Dan Nurwani (2021), Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) kota Medan, BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi SIPD untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah Kota Medan dan penggunaan SIPD telah digunakan sepenuhnya. Penelitian kedua yang menjadi referensi bagi penulis yaitu pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang ditulis oleh Maulana Yusup (2016), aplikasi yang digunakan serta diteliti yang dimana merupakan dua aplikasi yang berbeda yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pemerintahan daerah. Penelitian ketiga yang menjadi referensi bagi penulis yaitu perancangan dan penerapan sistem informasi akuntansi berbasis website pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam As-Syafi'iyah ditulis oleh Mujiani, S., dan Mardhiyah, K (2019) Perancangan dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Website pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi'iyah, tujuan dari penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis elektronik yang digunakan untuk mempermudah urusan adminitrasi, memberikan manfaat, meminimalkan kesalahan serta mengoptimalkan kegiatan administrasi. Penelitian keempat yang menjadi referensi bagi penulis yaitu Implementasi Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah Kota Manado ditulis oleh Wuara C N C, Kimbal A, dan Kumayas N (2020) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado, meneliti mengenai penerapan SIPD yang digunakan di Pemerintah Daerah. Perbedaan dari penelitian ini adalah lokus pengumpulan data yang dilakukan dimana pada penelitian ini lokus yang digunakan berada di BAPPELITBANGDA sedangkan penulis mengambil lokus penelitian di BPKAD. Penelitian kelima yang menjadi referensi bagi penulis adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan ditulis oleh Zubaidi N, Cahyono D, dan Maharani A (2019), membahas tentang penggunaan teknologi dalam hal ini sistem informasi apakah

sudah efektif atau belum. Perbedaan dalam penelitian terdapat pada penggunaan teknologi informasi dalam mengukur kualitas keefektivitas suatu sistem informasi dalam sebuah laporan keuangan. Penelitian keenam yang menjadi referensi bagi penulis adalah Analisis Penerapan Good Governace Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang ditulis oleh Syairozi I M, Pambudy P A, dan Yaskun M (2021), penggunaan sistem informasi dalam tata kelola keuangan yang disediakan melalui sistem informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ketujuh yang menjadi referensi bagi penulis adalah Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk yang ditulis oleh Ekaputra D N (2021) , penelitian ini adalah meneliti penerpan sistem informasi pemerintahan daerah apakah telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengaplikasiannya. Penelitian kedelapan yang menjadi referensi bagi penulis adalah Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembagunan Daerah yang ditulis oleh Sudianding K N, dan Seputra A K (2019), penelitian ini adalah pentingnya tata kelola sistem informasi dalam memberikan informasi yang berkualitas dan menunjang berjalannya pemerintahan. Penelitian kesembilan yang menjadi referensi bagi penulis adalah Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Manual pada Yayasan Asy-Syifa SumberJambe ditulis oleh Permatasari M (2018), penelitian ini adalah mencari permasalahan yang dihadapi oleh yayasan asy-syifah dalam penyusunan laporan laporan keuangan dimana terdapat pada sumber daya manusia yang masih kurang memahami dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi sistem informasi. Penelitian ke sepuluh yang menjadi referensi bagi penulis adalah Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Kualitas Sistem Kualitas Informasi Pengguna Aktual Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Di Kota Denpasar ditulis oleh Dewi Trisna N A S, dan Dwiranda AANB (2013), penelitian ini membahas mengenai Penerapan SIPKD yang memberikan manfaat terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. SIPKD memberikan kemudahan bagi organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana penerpan SIPD pada lingkungan BPKAD Kabuapten Biak Numfor yang dapat meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, cepat, efektif, dan efisien yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memiliki kessamaan sampel dalam penelitian yang dilakukan yaitu penerpan SIPD tetapi memiliki lokus yang berbeda dan pembahasan atau penelitian yang berbeda dalam penerapan SIPD yang melihat dari bagaimana perubahan yang dapat terjadi ketika pengelolaan keuangan darrah menggunakan SIPD pada lingkungan BPKAD Kabupaten Biak Numfor.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Bpkad Kabupaten Biak Numfor.

II. METODE

Menurut Sugiyono (2020 : 2) menjelaskan metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif dengan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan

Maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dekskriptif dengan menggunakan data induktif dalam mengambil kebenaran umum dari fenomena atau suatu kejadian. Peneliti mendeskripsikan fenomena atau kejadian secara merinci yang dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, menggunakan teori berdasarkan Sistem Informasi Manajemen menurut Laudon dan Laudon 2005 : (99-141) dengan dimensi : Organisasi, Manajemen, Teknologi, dan Keahlian

3.1 Organisasi

Organisasi memiliki peran penting pada penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah karena dalam pelaksanaannya SIPD membutuhkan organisasi perangkat daerah yang terkoordinir untuk melakukan koordinasi atau kerjasama tim yang baik. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melewati BPKAD Kabupaten Biak Numfor yang merupakan pelaksana tugas dan kebijakan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, diharuskan untuk menggunakan SIPD agar dapat mencapai tujuan OPD yaitu dapat bekerjasama dengan baik dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfro, Bapak Gunadi S.sos, M.Si pada tanggal 11 januari 2024 mengatakan bahwa :

Dalam kebijakan menggunakan SIPD merupakan kewenangan dari pemerintah pusat yaitu Kementrian Dalam Negeri, serta menjadi sarana dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang saling terhubung dengan pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya Kementrian Dalam Negeri memberikan kebijakan kepada setiap pemerintah daerah untuk tidak harus menggunakan SIPD secara menyeluruh dimana disesuaikan dengan beberapa kendala atau kemampun yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD dalam menginputan data pengelolaan keuangan seperti contoh yang dapat diberikan adalah pada fitur penatausahaan dan pelaporan dimana belum bisa digunakan oleh BPKAD Kabupaten Biak Numfor, BPKAD Kabupaten Biak Numfor sudah menggunakan SIPD dalam pengelolaan keuangan berbasis elektronik tetapi hanya pada penyusunan APBD saja, sehingga untuk proses penatausahaan dan pelaporan masih menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah dan juga aplikasi sebelumnya yang telah dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri.

Dengan menggunakan SIPD, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan, serta *real-time* tentang keuangan daerah dan dapat melakukan pengambilan

keputusan dengan tepat, tetapi perlu diatur kembali tentang pengelolaan SIPD secara khusus pada peraturan daerah baik dari SIPD sendiri dan SDM yang mengelolanya.

3.2 Manajemen

Dalam manajemen keselarasan merupakan hal yang sangat digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan digunakan pada penerapan atau implementasi suatu kebijakan, sehingga tidak dapat meringankan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan menurut Bapak Gunadi S.sos, M.Si selaku kepala Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Januari 2024 menyatakan bahwa :

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini BPKAD menggunakan dua aplikasi dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah SIPD yang berguna dalam proses perencanaan dan penganggaran dan SIPD didapatkan secara gratis melalui Kementerian Dalam Negeri, yang kedua adalah aplikasi SWARUSER yang berguna pada proses penatausahaan dan pelaporan akuntansi, aplikasi ini dibangun menggunakan sumber dana dari APBD. Kepala BPKAD menjelaskan juga bawasannya akan mengusahakan untuk dapat menggunakan aplikasi SIPD secara menyeluruh pada tahun ini 2024.

TABEL 4. 1 Kelompok data umum SIPD

NO	KELOMPOK DATA	JENIS DATA
1.	Data umum	1. Geografi (letak atau posisi suatu daerah) 2. Pemerintahan (administrasi pemerintah, aparatur negara, administrasi kepegawaian) 3. Demografis (populasi atau jumlah penduduk)

Sumber : bpkad.biakkab.go.id (2024)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, manajemen pada Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah sudah cukup baik hal ini karena BPKAD Kabupaten Biak Numfor sebagai pelaksana kebijakan tersebut dalam manajemen telah sesuai dengan peraturan yang mendasar yaitu Undang – Undang Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

3.3 Teknologi

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi lain sebagai pemerintah daerah yang mengelola teknologi, dimana membutuhkan orang yang sadar dan mampu untuk mengelolanya karena kebutuhan masyarakat dalam menerima pelayanan dan mendukung keputusan pemerintah. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dari pusat sampai ke daerah merupakan langkah yang bisa dilakukan BPKAD Kabupaten Biak Numfor dalam upaya penerapan sistem informasi pemerintah daerah pada pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memuat keputusan dengan cepat dan akurat. Bapak Saipan.ST selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah mengatakan bahwa :

Penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi hal yang penting dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang terpusat secara luas yang bukan saja teknologi informasi, BPKAD sendiri menggunakan jaringan jaringan internet ASTINET yang merupakan produk lain dari PT.Telkom Indonesia (Persero), sehingga sangat memudahkan pengguna dalam mengakses *website* SIPD dengan cepat.

Maka perlu ditanggungjawabkan agar mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. SIPD merupakan bentuk konsep pelayanan publik yang efisien dan adil dimana meliputi bidang sosial politik dan ekonomi serta berkaitan dengan fungsi-fungsi badan penyelenggaraan negara baik yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Sistem Informasi Pemerintah Daerah juga merupakan pendukung dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dengan baik

3.4 Keahlian

Pada penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan ahli dalam menggunakan teknologi informasi maupun non teknologi. Sumber daya manusia yang mampu dan mempunyai keahlian dalam teknologi informasi memiliki fungsi sebagai penentu pada penerapan SIPD secara menyeluruh, hal ini berkaitan dengan teknologi yang tidak semua orang dapat menguasainya. Begitu pentingnya keahlian pada pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka fasilitasi jaringan yang baik menjadi dasar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal ataupun pakar dalam menggunakan teknologi informasi dalam hal ini adalah SIPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, Bapak Gunadi S.sos, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Biak Numfor pada tanggal 11 januari 2024 menyatakan bahwa :

BPKAD sendiri baru memperkenalkan dan mensosialisasikan aplikasi SIPD pada proses penyusunan APBD, yaitu dengan dilakukannya proses pendampingan, asistensi penyusunan, serta *work shop* yang dilakukan oleh BPKAD untuk memperkenalkan aplikasi SIPD. Karena teknologi informasi yang setiap saatnya pasti mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa maka dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang sistem informasi yang paham dan dapat mengoperasikannya.

BPKAD Kabupaten Biak Numfor oleh setiap OPD haruslah memiliki teknologi informasi yang berkualitas agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan SIPD serta penyajian dalam bentuk laporan yang lebih berkualitas dan bisa

dipertanggungjawabkan. Maka perlunya diatur dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai kebutuhan SDM yang mampu mengelola SIPD secara baik dan benar serta aturan daerah yang mengatur mengenai penggunaan SIPD pada lingkungan pemerintahan daerah.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Di era globalisasi industri 4.0 saat ini segala sesuatunya dipermudah dengan adanya teknologi yang maju, dampak dari kemajuan teknologi ini sangat banyak salah satu dampak dari kemajuan ini adalah pengelolaan data yang memanfaatkan sistem informasi. Sistem informasi merupakan konsep yang melibatkan penggunaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) untuk mengelola, memproses, menyusun, dan menyimpan dengan tujuan menghasilkan informasi yang berguna. Sistem Informasi merupakan suatu komponen yang saling berhubungan dengan proses penciptaan dan penyampaian informasi dalam perusahaan, yang memproses input berupa sumber data, kemudian diproses dengan komponen *hardware*, *software*, dan *brainware* dan menghasilkan informasi sebagai output. Marimin et al(2016:18).

Dalam mewujudkan suatu peningkatan dalam sistem informasi pemerintahan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, merupakan kebijakan yang memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan transparansi antara pemerintah dengan masyarakat, peraturan ini memberikan landasan hukum dan pedoman teknis mengenai sistem informasi pemerintahan daerah seperti publikasi informasi keuangan dan program – program pemerintah secara terbuka, data keuangan dan informasi pemerintahan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat melalui portal *online*.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD adalah sebuah aplikasi terpadu yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektifitas implementasi serta akuntabilitas dari berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Memungkinkan publik dalam mengakses keuangan pemerintahan daerah secara realtime, pemerintah daerah dapat memantau penggunaan anggaran dengan lebih efisien, mengotomatiskan berbagai proses administrasi untuk efisiensi waktu, menggabungkan berbagai data keuangan dari semua departemen untuk meminimalisir duplikasi data, tersediannya sistem khusus pada SIPD untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan SAP standar akuntansi pemerintahan serta mempermudah proses audit. Ruang lingkup dari SIPD meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. SIPD dibuat dengan maksud dan tujuan dalam menciptakan layanan informasi pemerintahan daerah yang bersifat elektronik, saling terhubung, dan terintegritas secara nasional. Sistem ini memudahkan pengawasan kinerja pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan membantu menyamakan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan inovatif di seluruh wilayah negara dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Muhammad Irfan Nasution (2021 : 109).

Salah satu ruang lingkup dalam SIPD tentang informasi keuangan daerah sejalan dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Terhadap Publik dalam menciptakan transparansi antar pemerintah dan masyarakat, serta dalam membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Penerapan undang undang ini sangat relevan terutama pada daerah - daerah otonomi yang diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. sebagian besar OPD telah

menerapkan SIPD untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan administrasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pemerintah pusat. Maka SIPD berperan penting dalam mendukung implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan menyediakan media untuk menyajikan informasi pemerintahan daerah secara transparan kepada publik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan SIPD telah dilaksanakan dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Biak Numfor tetapi dari teori Sistem Informasi Manajemen menurut Laudon-Laudon dapat dilihat bahwa ada beberapa dimensi yang perlu ditingkatkan kembali atau diperiki yaitu pada dimensi keahlian, teknologi, dan organisasi yang mana perlunya diatur kembali oleh Kabupaten Biak Numfor mengenai penggunaan SIPD serta kebutuhan SDM dalam mengelola SIPD dengan benar hal ini harus segera dilakukan mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisien, serta pengambilan keputusan yang baik dan benar agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan aturan serta kenijakan yang ada. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Organisasi Perangkat Daerah saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan hasil pencarian serta wawancara yang dilakukan secara via pengiriman pesan melalui aplikasi *watsapp*.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari temuan penelitian dapat diteruskan dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi yang harus diperbaiki ,oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program evaluasi penerapan SIPD di BPKAD Kabuapten Biak Numfor, untuk menemukan hasil penerapan SIPD telah berjalan sampai dimana dan saran yang diberikan oleh penuli telah dibuat atau belum yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPKAD Kabuapten Biak Numfor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Laudon C, Kenneth, dan Laudon P, Jane (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Marimin, et al. (2016). *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor : Grasindo
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. PT.Rineka Cipta.jakarta.
- Abdul, H.(2001). *Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : UPP-AMP YPKN.

- Nusation, I. M., Dan Nurwani (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol 9, No 2, pp. 109 – 116.
- Yusup, M., (2016) Pengaruh Sistem Informasi Penegelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship*. Vol !0, No 2, pp.149 – 160.
- Mujiani, S., dan Mardhiyah, K (2019). Perencanaan dan Penerpan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Website Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi'iyah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 1, no 1, pp. 34 – 47.
- Perencanaan dan Penerpan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Website Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi'iyah.
- Nasution, D.A.D (2018). Analisis Pengaruh pengelolaan keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi dan keuangan*. Vol 2, No 3, pp. 149 – 162.
- Syairozi I M, Pambudy P A, dan Yaskun M (2021). Analisis Penerapan Good Governace Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Inovatif pada Masa Pandemi Covid-19*. Vol 1, no 1, pp. 49-59.
- Ekaputra D N (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Keuangan Daerah*. Vol 21, no 1, pp. 62-79.
- Wuara C N C, Kimbal A, dan Kumayas N (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol 2, no 5, pp. 1-13.
- Dewi Trisna N A S, dan Dwiranda AANB (2013). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Kualitas Sistem Kualitas Informasi Pengguna Aktual Dan Kepuasan Pengguna Terrhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 4, no 1, pp. 196-214.
- Sudianding K N, dan Seputra A K (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal locus majalah ilmiah FISIP*. Vol 11, no 2, pp. 112-133.
- Zubaidi N, Cahyono D, dan Maharani A (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *International Journal of Social Science and Business*. Vol 3, no 2, pp. 68-76.
- Permatasari M (2018). Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Manual pada Yayasan Asy-Syifah SumberJambe. *International Journal of Social Science and Business*. Vol 2, no 4, pp. 216-223.
- Peraturan Mentrian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Terhadap Publik

